

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REALISASI JUMLAH
PENERIMAAN PAJAK HOTEL
(Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung)**

Hervia Nanda Alista

Jurusan Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: hervia.nanda@gmail.com

Abstract

Hotel tax is one source of local own-source revenue (PAD). The Government is trying to increase their of hotel taxes income in order to increase their local own-source revenue (PAD). The research aims to analyze the influence of the number of tourists, the rate of inflation, and gross regional domestic product (PDRB) to the hotel taxes income in Kabupaten Tulungagung for the period 2006-2013.

The data used are secondary data (time series) the for the period 2009-2013 obtained from the Local Revenue Offices (DISPENDA) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Kabupaten Tulungagung. Among three variables, which were number of tourists, the rate of inflation and gross regional domestic product (PDRB), the most dominant influential variable to the Hotel Taxes Income is gross regional domestic product (PDRB). Based on this result, the researcher suggests to Government of Kabupaten Tulungagung must consider gross regional domestic product (PDRB) as the key indicator to improve Hotel Taxes Income in Kabupaten Tulungagung.

Keywords: Hotel Tax, Number of Tourists, The Rate of Inflation and Gross Regional Domestic Product (PDRB)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki keragaman budaya, sosial dan kondisi perekonomian antar masing-masing daerah yang membutuhkan suatu sistem pembangunan daerah yang lebih efektif. Untuk itu Pemerintah memberikan otonomi pada Pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah tersebut mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri agar tidak terlalu bergantung pada Pemerintah pusat, misalkan kebijakan, keuangan, dll.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari

dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, termasuk didalamnya ada Pajak Hotel, pengertian Pajak Hotel menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat (20) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung tahun 2010-2013 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2010	Rp. 675.000.000,00	Rp. 823.362.899,90
2011	Rp. 800.000.000,00	Rp. 970.023.399,90
2012	Rp. 950.000.000,00	Rp. 1.082.704.274,00
2013	Rp.1.100.000.000,00	Rp. 1.413.656.101,00

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (2014)

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi penerimaan pajak hotel setiap tahunnya sangat tinggi, Alasan peneliti melakukan penelitian tentang pajak hotel, karena peneliti tertarik dengan tingkat penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung yang presentase kenaikannya sangat tinggi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi jumlah penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung.

Faktor- faktor yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Jumlah wisatawan, laju inflasi dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena hotel merupakan salah satu tempat yang paling dicari wisatawan untuk menginap, wisatawan bertindak sebagai konsumen yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan hotel itu sendiri.

Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunya nilai mata uang, yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengelola hotel akan menurun, sehingga penerimaan pajak hotel juga akan menurun.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) juga mempunyai dampak yang luas terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula.

Berdasarkan uraian diatas sangat menarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, laju inflasi dan PDRB dalam mempengaruhi realisasi jumlah penerimaan pajak hotel pada suatu daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian dari daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Kesimpulan Dari beberapa pengertian otonomi daerah yang diberikan diatas, dapat dilihat bahwa secara umum definisi mengenai otonomi daerah memiliki kesamaan satu sama lain.

Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Pinjaman daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2011), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10), tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) dan (2), Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan

bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok,

- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pajak Hotel

Pengertian Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 pasal 1 ayat (9) yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Perda tentang Pajak Hotel memberikan kepastian hukum mengenai subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Selain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di Daerah.

- a. Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 16 tahun 2010 pasal 4, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pekayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel, yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu:

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum, dan
- 6) Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 16 tahun 2010 pasal 5, subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 16 tahun 2010 pasal 6,7 dan pasal 8, dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel (10%) dengan dasar pengenaan.

d. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 16 tahun 2010 pasal 9, Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan, dengan kata lain seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan diadakannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat hotel berlokasi. Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan hotel. Nota penjualan tersebut disediakan oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu diproporsikan atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah.

e. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang, serta Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Berdasarkan Perda Kabupaten Tulungagung nomor 16 tahun 2010 pasal 10, masa Pajak Hotel adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan selama satu bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel. Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pengaruh jumlah wisatawan, laju inflasi dan, PDRB terhadap realisasi jumlah penerimaan Pajak Hotel.

a. Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan:

- 1) Wisatawan lokal (*local tourist*)
- 2) Wisatawan mancanegara (*international tourist*)
- 3) *Holiday tourist*
- 4) *Business tourist*
- 5) *Common interest tourist*
- 6) *Individual tourist*
- 7) *Group tourist*

Perkembangan jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, karena hotel merupakan salah satu tempat yang paling dicari wisatawan untuk menginap, wisatawan bertindak sebagai konsumen yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan hotel itu sendiri. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi jumlah wisatawan akan berpengaruh terhadap potensi penerimaan pajak hotel.

b. Laju Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau meningkatkan kenaikan) sebagian besar dari barang-barang lain.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan terjadinya inflasi, antara lain Indeks Biaya Hidup (*cost of living*), Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (*GDP Deflator*) atau Indeks Harga Perdagangan Besar (*whole sale prices index*). Beberapa indeks harga yang sering digunakan dalam pengukuran inflasi adalah :

- 1) Indeks harga konsumen/IHK (*consumer price index*)
- 2) Indeks harga perdagangan (*whole sale price index*)
- 3) GNP deflator

Laju inflasi juga mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak hotel, laju inflasi akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan turunya nilai mata uang, yang menyebabkan berkurangnya minat seseorang untuk menginap di hotel, serta mengakibatkan keuntungan yang diperoleh pengelola hotel akan menurun, sehingga penerimaan pajak hotel juga akan menurun. Disini dapat diasumsikan bahwa laju inflasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, dimana bila laju inflasi meningkat, maka penerimaan pajak hotel akan menurun.

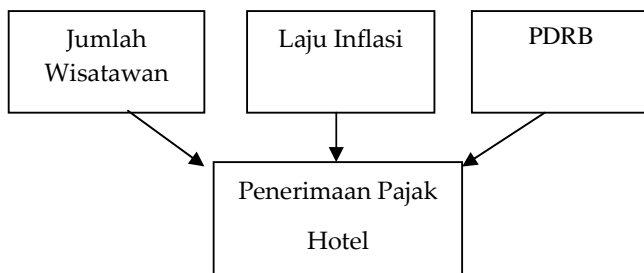
c. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai tambah barang atau jasa yang diperoleh di dalam suatu wilayah atau daerah dalam satu tahun tertentu. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun

menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya, untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB mempunyai dampak yang luas terhadap penerimaan pajak hotel. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu pajak hotel.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka Hipotesis

Berdasarkan kerangka hipotesis diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga variabel jumlah wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung.
2. Diduga variabel laju inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung.

3. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan variabel jumlah wisatawan, laju inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen dan penerimaan pajak hotel sebagai variabel dependen. Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode *explanatory research*. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik.

Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti tertarik dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung yang jumlah kenaikannya tinggi, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini terdapat Variabel Independen dan Variabel Dependen. Yang termasuk dalam Variabel Independen yaitu Jumlah wisatawan (X_1), Laju Inflasi (X_2), dan PDRB (X_3). Dan yang menjadi Variabel Dependen (Y) adalah Penerimaan Pajak Hotel (Y).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

sekunder, dan data runtun waktu (*time series*) dengan periode pengamatan antara tahun 2006 sampai tahun 2013 dihitung per triwulan.

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis Rasio, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Menurut Ghazali (2006), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan *scatterplot*. Pada prinsipnya, normalitas dapat diketahui dari penyebaran data (titik). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis grafik *scatterplot* dan Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*

b. Uji asumsi Multikolenieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Kolinieritas ganda terjadi apabila terdapat hubungan yang sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel secara individu terhadap variabel terikat.

c. Uji Asumsi Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

d. Uji Asumsi Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linear Berganda yaitu untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan untuk menguji mengenai seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel, maka digunakan rumus regresi linear berganda sebagai berikut : Menurut Gujarati (1995:196), $Y = \beta_0 + \beta_1 JMLWST + \beta_2 INFL + \beta_3 PDRB + \mu$

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu, di mana nilai R yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji Hipotesis Simultan

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-

sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

c. Uji Hipotesis Parsial

Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menganggap variabel lain tetapi dengan menggunakan derajat keyakinan 5 %. Hipotesis yang akan diuji menurut Gujarati (1995:119) adalah : $H_0 : \beta_1 = 0$ variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. $H_a : \beta_1 \neq 1$ variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya adalah : Apabila nilai t signifikan, atau jika nilai probabilitasnya $<$ tingkat α (derajat signifikan) maka koefisien regresi signifikan pada tingkat tertentu maka H_a ditolak, H_0 diterima, artinya

variabel independen berpengaruh secara signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data realisasi jumlah penerimaan pajak hotel Kabupaten Tulungagung tahun 2006-2013 pertriwulan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung tahun 2006-2013

Tahun	Penerimaan per Triwulan	Total penerimaan per Tahun
2006	Rp 122,657,812.50	Rp 500,700,000.00
	Rp 124,335,937.50	
	Rp 126,014,062.50	
	Rp 127,692,187.50	
2007	Rp 137,784,375.00	Rp 581,400,000.00
	Rp 147,871,875.00	
	Rp 142,828,125.00	
	Rp 152,915,625.00	
2008	Rp 144,347,800.59	Rp 574,985,923.80
	Rp 143,946,920.83	
	Rp 143,546,041.07	
	Rp 143,145,161.31	
2009	Rp 136,374,034.70	Rp 570.208.068,40
	Rp 140,492,689.60	
	Rp 144,611,344.60	
	Rp 148,729,999.50	
2010	Rp 182,107,459.50	Rp 823.362.899,90
	Rp 197,929,636.50	
	Rp 213,751,813.50	
	Rp 229,573,990.40	
2011	Rp 228,756,428.10	Rp 970.023.399,90
	Rp 237,922,709.40	
	Rp 247,088,990.60	
	Rp 256,255,271.90	
2012	Rp 260,112,236.60	Rp 1.082.704.274,00
	Rp 267,154,791.20	
	Rp 274,197,345.80	
	Rp 281,239,900.40	
2013	Rp 322,387,291.50	
	Rp 343,071,780.70	

Rp	363,756,269.80	
Rp	384,440,759.00	Rp 1.413.656.101,00

Sumber : DISPENDA Kabupaten Tulungagung (2014)

Data Jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2006-2013 per triwulan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Wisatawan dan Laju Inflasi dan PDRB Kab. Tulungagung tahun 2009 - 2013.

Tahun	Jumlah Wisatawan	Laju Inflasi	PDRB
2006	46.490	7.77%	Rp 1.519.017.63
	53.716	7.77%	Rp 1.539.128.41
	60.943	7.77%	Rp 1.559.239.18
	68.169	7.77%	Rp 1.579.349.95
2007	40.176	6.85%	Rp 1.604.832.22
	33.315	6.85%	Rp 1.627.091.59
	26.454	6.85%	Rp 1.649.350.96
	19.593	6.85%	Rp 1.671.610.33
2008	33.146	4.64%	Rp 1.696.337.26
	34.450	4.64%	Rp 1,719.583.65
	35,754	4.64%	Rp 1.742.830.04
	37.059	4.64%	Rp 1.766.076.44
2009	35.396	4.64%	Rp 1.798.187.40
	35.513	4.64%	Rp 1.824.979.60
	35.629	4.64%	Rp 1.851.771.80
	35.745	4.64%	Rp 1.878.564.10
2010	34.513	6.25%	Rp 1.912.811.10
	34.090	6.25%	Rp 1.942.585.30
	33.669	6.25%	Rp 1.972.359.50
	33.246	6.25%	Rp 2.002.133.60
2011	37.286	3.60%	Rp 2.039.851.30
	38.649	3.60%	Rp 2.072.802.90
	40.011	3.60%	Rp 2.105.754.50
	41.375	3.60%	Rp 2.138.706.00
2012	39.164	4.63%	Rp 2.180.543.50
	39.098	4.63%	Rp 2.217.049.40
	39.031	4.63%	Rp 2.253.555.30
	38.965	4.63%	Rp 2.290.061.30
2013	117.778	8.05%	Rp 2.327.990.80

	149.264	8.05%	Rp 2.365.066.10
	180.750	8.05%	Rp 2.402.141.50
	212.234	8.05%	Rp 2.439.216.80

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung (2014)

Data per triwulan jumlah wisatawan dan laju inflasi yang disajikan pada penelitian ini, besarnya sama dengan data per tahun, yang disebabkan karena adanya keterbatasan data kemudian diasumsikan bahwa besarnya data pada satu tahun adalah sama nilainya dengan nilai per triwulan, dan nilai satu tahun itu bukan merupakan penjumlahan tiap triwulan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Tulungagung telah mampu mencapai target penerimaan Pajak Daerah. Kondisi ini terlihat dari tingkat efektivitas yang selalu mencapai diatas 100 %. Pada uji asumsi klasik dan uji hipotesis data jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB di logaritma natural (Ln).

Hal ini terjadi pula terhadap tingkat efisiensi penerimaan Pajak Hotel yang menunjukkan bahwa rasio Efisiensi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung baik, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2012 dan naik lagi pada tahun 2013. Rasio paling tinggi terjadi pada tahun anggaran 2012 sebesar 4,39% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,89%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 4.17%.

1. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Asumsi normalitas Residual

Metode yang digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian disajikan berikut ini :

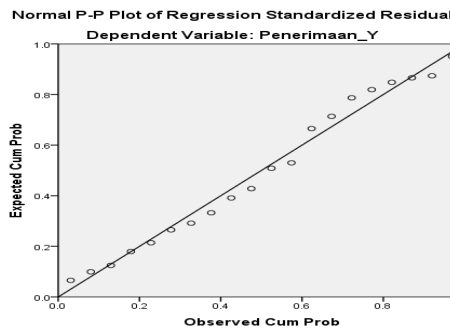
Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Residual (Galat)	Signifikansi K-S	Keterangan
Model	0,976	Normal

Sumber : Data Diolah, 2014

Asumsi normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan pada tabel 4.10. Asumsi ini terpenuhi jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov residual model lebih besar dari alpha 5%. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,976. Karena nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari alpha 5% (0,050) maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Selain menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, pengujian asumsi normalitas dapat pula dilakukan dengan menggunakan gambar histogram dan normal p-p plot.



Gambar 2. Histogram dan Normal P-P Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2. memperlihatkan bahwa data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Asumsi Multikolinieritas

Tabel 7. Hasil Pengujian Multikolinieritas

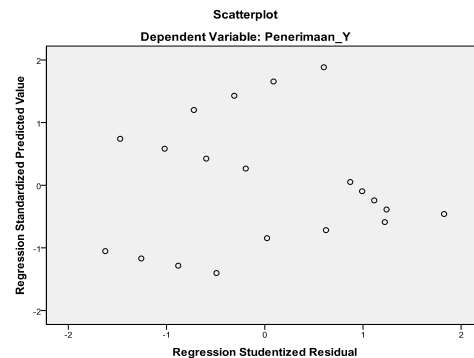
Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Jumlah Wisatawan (X1)	0,222	4,497	Bebas Multikol
Laju Inflasi (X2)	0,368	2,715	Bebas Multikol
PDRB (X3)	0,441	2,268	Bebas Multikol

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 7. merupakan hasil pengujian non multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada Jumlah wisatawan (X1), Laju Inflasi X2, dan PDRB (X3) lebih kecil dari 10, maka hipotesis H_0 diterima yaitu tidak terdapat hubungan linier variabel antar variabel bebas Sehingga secara umum asumsi Non Multikolinieritas ini terpenuhi.

c. Uji Asumsi Heterokedastisitas

Adapun grafik hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan SPSS versi 20.0 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 3. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Hasil analisis pada Gambar 3. menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heterokedastisitas pada kedua model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi. Selain

penggunaan grafik, pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregresikan nilai residual dimutlakan dengan variabel bebas. Nilai signifikansi yang lebih besar dari alpha 0,05 menunjukkan bahwa asumsi non heterokedastisitas terpenuhi.

Tabel 8. Hasil Pengujian Heterokedastisitas Uji Glejser

Variabel Bebas	t hitung	Sig.	Keterangan
Jumlah Wisatawan (X1)	-0,756	0,460	Bebas hetero
Laju Inflasi (X2)	-0,462	0,650	Bebas hetero
PDRB (X3)	0,018	0,986	Bebas hetero

Sumber : Data Diolah, 2014

Tabel 8. merupakan hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Jumlah Wisatawan (X1) sebesar 0,460, Laju Inflasi (X2) sebesar 0,650, dan PDRB (X3) sebesar 0,986 dan lebih besar dari alpha 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi non heterokedastisitas terpenuhi.

d. Asumsi Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Pengujian Autokorelasi

A	dL 0,998	C	dU 1,676	B	4-dU 2,324	C	4-dL 3,002	A
Durbin Watson (DW) = 1,686								

Keterangan: A: Terdapat autokorelasi B: Bebas autokorelasi C: Daerah abu-abu

Hasil pengujian asumsi autokorelasi dengan metode Durbin Watson pada Tabel 4.12 didapatkan nilai DW sebesar 1,686 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat autokorelasi karena nilai autokorelasi diantara dU dan 4-dU.

2. Analisis Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini yaitu untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dan untuk menguji mengenai seberapa besar pengaruh jumlah wisatawan, laju inflasi, dan PDRB terhadap penerimaan Pajak Hotel. Hasil perhitungan regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu

Penerimaan Pajak Hotel (Y) dengan variabel independen yaitu Jumlah Wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3). Hasil perhitungan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.13 dibawah ini :

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel bebas	Koefisien Regresi	t hitung	Sig. t	Keterangan
Konstanta	-4,416	-10,088	0,000	Signifikan
Jumlah Wisatawan (X1)	0,152	1,434	0,171	Non Signifikan
Laju Inflasi (X2)	0,027	0,958	0,352	Non Signifikan
PDRB (X3)	3,143	15,298	0,000	Signifikan
t tabel =	= 2,12			
t _(16,5%)				
R	= 0,989			
R-square	= 0,977			
Adj. R-square	= 0,973			
F hitung	= 229,332			
Sig. F	= 0,000			
F tabel =	= 3,24			
F _(3,16,5%)				

Sumber : Data Diolah, 2014

Variabel dependen pada hasil uji regresi berganda adalah Penerimaan Pajak Hotel (Y) sedangkan variabel independennya adalah Jumlah Wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3). Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah :

$$Y = -4,416 + 0,152 \text{Jumlah Wisatawan} + 0,027 \text{Laju Inflasi} + 3,143 \text{PDRB} + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda, dapat diketahui bahwa :

- 1) Koefisien regresi Jumlah Wisatawan (X1) sebesar 0,152 dengan nilai t hitung 1,434 (lebih kecil dari 2,12) atau nilai signifikan 0,171 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel jumlah wisatawan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan jumlah wisatawan (X1)

sebesar 1 juta orang maka Penerimaan Pajak Hotel (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,152 juta.

- 2) Koefisien regresi Laju Inflasi (X2) sebesar 0,027 dengan nilai t hitung 0,958 (lebih kecil dari 2,12) atau nilai signifikan 0,352 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Laju inflasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan hotel (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan Laju Inflasi (X1) sebesar 1% maka Penerimaan Pajak Hotel (Y) maka akan mengalami peningkatan sebesar 0,027 juta.
- 3) Koefisien regresi PDRB (X3) sebesar 3,143 dengan nilai t hitung 15,298 (lebih besar dari 2,12) atau nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel PDRB (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan PDRB (X3) sebesar 1 juta maka Penerimaan (Y) belum tentu akan mengalami peningkatan sebesar 3,143 juta.

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Menurut Ghozali (2006), kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh

secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *R Square* untuk mengevaluasi model regresi terbaik.

Berdasarkan Tabel 10. dapat diketahui nilai *R Square* sebesar 0,977 atau 97,7%. Artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel (Y) dijelaskan sebesar 97,7% oleh variabel jumlah wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3). Sedangkan sisanya sebesar 2, 3% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak teliti dalam penelitian ini.

c. Uji Hipotesis Simultan

Untuk menguji hipotesis pengaruh simultan dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik F. Dalam hipotesis I, diduga bahwa variabel jumlah wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3) secara bersama-sama mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2. menunjukkan bahwa F hitung sebesar 229,332 (Sig F = 0,000). Jadi, F hitung > Ftabel (229,332 > 3,24) dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05). Dengan demikian H_1 diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel jumlah wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Penerimaan Pajak Hotel (Y). Maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pengaruh Jumlah wisatawan (X1), Laju Inflasi (X2), PDRB (X3) terhadap Penerimaan Hotel (Y).

d. Uji Hipotesis Parsial

Untuk menguji hipotesis II yaitu pengaruh parsial dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), digunakan uji statistik t. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari tiga variabel

independen terdapat satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Wisatawan (X1)

Tabel 11. Variabel Wisatawan

Variabel bebas	Koefisien	t hitung	Sig. t	Keterangan
Jumlah Wisatawan (X1)	0,152	1,434	0,171	Non Signifikan

Untuk jumlah wisatawan (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 1,434. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,12) dan Sig t (0,171) lebih besar dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk Ho diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial jumlah wisatawan (X1) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Y).

2) Variabel Laju Inflasi (X2)

Tabel 12. Variabel Inflasi

Variabel bebas	Koefisien	t hitung	Sig. t	Keterangan
Laju Inflasi (X2)	0,027	0,958	0,352	Non Signifikan

Untuk Laju Inflasi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 0,958. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,12) dan Sig t (0,352) lebih besar dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk Ho diterioma. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial Laju Inflasi (X2) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Y).

3) Variabel PDRB (X3)

Tabel 13. Variabel PDRB

Variabel bebas	Koefisien Unstandardized	t hitung	Sig. t	Keterangan
PDRB (X3)	0.541	0.851	0.407	Non Signifikan

Untuk variabel PDRB (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,541. Nilai ini lebih kecil dari t tabel (2,120) dan Sig t (0,407) lebih besar dari 5% (0,05). Sehingga pengujian hipotesis untuk Ho ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel PDRB (X3) tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak (Y).

Interprestasi Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Hasil itu juga tidak sesuai dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa apabila meningkatnya jumlah wisatawan akan disertai dengan peningkatan penerimaan Pajak Hotel.

Dari penelitian ini Koefisien regresi Jumlah Wisatawan (X1) sebesar 0,152 dengan nilai t hitung 1,434 (lebih kecil dari 2,12) atau nilai signifikan 0,171 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel jumlah wisatawan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan jumlah wisatawan (X1) sebesar 1 juta orang maka Penerimaan Pajak Hotel (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,152 juta.

Ketidaksesuaian antara teori dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung, karena dengan bertambahnya jumlah wisatawan tidak akan selalu disertai dengan peningkatan penerimaan Pajak Hotel. Wisatawan yang banyak jumlahnya belum tentu menjamin bahwa penerimaan Pajak Hotel akan menjadi banyak pula, hal ini dapat di sebabkan karena wisatawan yang berwisata di Kabupaten Tulungagung mayoritas tidak mengingap di hotel dalam jangka waktu yang panjang.

2. Pengaruh Laju Inflasi terhadap Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel laju inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Koefisien regresi Laju Inflasi (X2) sebesar 0,027 dengan nilai t hitung 0,958 (lebih kecil dari 2,12) atau nilai signifikan 0,352 (lebih besar dari 0,05) yang artinya bahwa variabel Laju inflasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan hotel (Y).

Ketidaksesuaian dengan hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel karena laju inflasi hanya akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat di tingkat menengah kebawah namun berbeda dengan masyarakat tingkat tinggi yang terbiasa dengan sifat konsumtif tinggi dan tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel yang mayoritas dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

3. Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel. Dari hasil Koefisien regresi PDRB (X3) sebesar 3,143 dengan nilai t hitung 15,298 (lebih besar dari 2,12) atau nilai signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang artinya bahwa variabel PDRB (X3) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y). Koefisien regresi yang bernilai positif menjelaskan bahwa apabila peningkatan PDRB (X3) sebesar 1 juta maka Penerimaan (Y) belum tentu akan mengalami peningkatan sebesar 3,143 juta.

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat pula, misalnya yaitu keinginan dan kemampuan masyarakat

untuk menginap di hotel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung tahun 2006 - 2013, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis, variabel jumlah wisatawan, laju inflasi dan, Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Hotel.
2. Jika dilihat secara parsial maka hanya variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Hotel, sedangkan variabel jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Hotel.
3. Hasil pengujian Koefisien Determinasi (R^2) 97,7%. Artinya variabel Penerimaan Pajak Hotel dijelaskan sebesar 97,7% oleh variabel jumlah wisatawan, Laju Inflasi, PDRB. Sedangkan sisanya sebesar 2,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau yang tidak teliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis data, dalam pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung supaya variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan indikator dalam menentukan peningkatan penerimaan

pajak hotel di Kabupaten Tulungagung.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel, harusnya dipertahankan bahkan ditingkatkan, yaitu melalui kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran, dengan cara meningkatkan nilai PDRB. Pemerintah disarankan berupaya meningkatkan kontribusi dari masing-masing sektor PDRB, sehingga dengan nilai PDRB yang semakin besar menunjukkan semakin besar pula potensi penerimaan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Tulungagung disarankan lebih memperhatikan tempat-tempat wisata yang menarik wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri untuk berwisata di Kabupaten Tulungagung dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.
4. Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, disarankan pada peneliti yang akan datang yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan metode penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandi, Vidya Dwi A. 2013. *Pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel kota Yogyakarta*. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. *Tulungagung Dalam Angka Tahun 2013*.
- Damodar, Gujarati. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga.
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2006. *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Helti, Kristiana Advina. 2010. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan di kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Surakarta: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Julastiana, Yaneka. 2012. *Analisis efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Klungkung*. Jurnal. Bali: Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana Bali.
- Lilik Yunanto. 2010. *Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel di kabupaten klaten*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UNS. Surakarta.
- Kusdiyarto. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel di pemerintah kota Semarang*. Jurnal. Semarang: Jurusan Akuntansi, Universitas Pandanaran Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Maulana, Ahmad. 2013. *Analisis potensi pemungutan pajak hotel dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota Palu*. Jurnal. Makassar: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Novi Dwi Purwanti, Retno Mustika Dewi. 2014. *Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Mojokerto tahun 2006-2013*. Jurnal. Surabaya: Progam studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya.
- Nugraha. 2012. *Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel*. Skripsi. Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Octaviana S, Devi. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- R. Azinar Muqaddas, Saleh Karim. 2011. *Faktor penentu penerimaan pajak perhotelan di kota Parepare*. Jurnal. Makassar: Pascasarjana Universitas Hassanudin Makassar.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang, Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta. Salemba empat.
- Rizky A.P., Elfayang. 2014. *Analisis efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.